

TANTANGAN DAN PELUANG STRATEGIS GEOPOLITIK INDONESIA

Erma Wati^{1*} dan Kamaria Ulpah²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sapta Mandiri Balangan
e-mail : erma.watiii1029@gmail.com

Abstrak: Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinteraksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. Pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. Pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini.

Kata Kunci: Geopolitik; Negara; Bangsa

Abstract: Geopolitical issues today are very complex because they involve how nations, countries and society in general interact without giving up their respective interests. At the same time, technological developments have led to a condition where the interaction occurs very quickly, which has never happened in human history. The existence of this high interaction can bring blessings but also disasters to humanity, which is very dependent on how actors understand and utilize geopolitical capabilities. Understanding and the ability to utilize geopolitics will provide strategic actors with an awareness of the consequences of every strategic policy they take. Geopolitical understanding is impossible to develop without recognizing the importance of the concept of nation and state today.

Keywords: Geopolitics; Country; Nation

PENDAHULUAN

Geopolitik adalah suatu istilah yang berkembang pertama kali di kalangan masyarakat elit Eropa dalam menggambarkan pertarungan kepentingan antar entitas di Eropa dan dunia saat itu. Istilah ini pada intinya berkaitan dengan studi interaksi antar kelompok manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dengan memperhatikan realitas geografis yang dihadapinya.

Geopolitik Indonesia merujuk pada kajian mengenai hubungan antara faktor geografi, politik, dan kekuatan internasional yang mempengaruhi posisi serta kebijakan Indonesia di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat penting, baik secara regional maupun global. Letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, Asia dan Australia, menjadikannya sebagai titik lintas jalur perdagangan internasional dan penghubung antara negara-negara besar di dunia.

Indonesia juga berada di kawasan yang rawan geopolitik, mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan negara-negara besar seperti China, India, dan Australia, serta

menjadi bagian dari ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara). Keadaan ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat strategis dan membuatnya memiliki pengaruh besar dalam berbagai isu regional dan global, seperti perdagangan internasional, masalah keamanan maritim, dan diplomasi multilateral.

Dalam konteks geopolitik, Indonesia harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dengan dinamika politik global, termasuk hubungan dengan negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, serta sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar dalam membentuk kebijakan luar negeri yang dapat memengaruhi stabilitas kawasan. Oleh karena itu, kajian geopolitik Indonesia melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai posisi geografis, peran Indonesia dalam tatanan global, serta bagaimana negara ini berinteraksi dengan kekuatan besar dan negara-negara tetangga untuk memastikan keamanan, kemakmuran, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Geopolitik Indonesia juga berkaitan erat dengan bagaimana Indonesia mengelola sumber daya alam yang melimpah serta tantangan dalam mempertahankan kedaulatan teritorial dan keutuhan wilayah negara kepulauan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan penelitian mengumpulkan sumber atau informasi (heuristik) lebih mendasarkan pada sumber sekunder berupa kajian literatur atau pustaka. Sumber sekunder tersebut yakni diperoleh dari perpustakaan maupun browsing di internet. Diperoleh dari buku, hasil penelitian, dan jurnal yang relevan sesuai kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Geopolitik

Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1944-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political Geography). Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi Geographical Politic. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (Geographical Politic) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu Bumi Politik Terapan (Applied Political Geography). Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik:

1. Geopolitik sebagai ilmu: memberikan wawasan obyektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia.
2. Geopolitik sebagai ideology (landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara): hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan.

Istilah geopolitik digunakan dalam berbagai kompleks, sejauh menyangkut tentang makna politik dari geografi, dan konstruksi strategis negara-negara terhadap konstruksi geografi (geostrategis).

Teore Geopolitik

1. Teori Geopolitik Fredefich Ratzel

- a. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup), yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
- b. Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang diterapkan oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh.
- c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung.
- d. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat dipelus dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.

2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Pokok-pokok teori Kjellen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi, sedangkan pokok teori Ratzel mencoba menerapkan metodologi biologi teori Evolusi Darwin yang sedang popular di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya

Pokok-pokok teori Kjellen menyebutkan:

- a. Negara merupakan satuan biologis, suatu organism hidup, yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.
- b. Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik memerintah)
- c. Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya.

3. Teori Geopolitik Karl Haushofer

Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada perang. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme.

Inti teori Haushofer adalah:

- a. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.

Nama Belakang Penulis (Jika lebih dari 3, maka tuliskan nama penulis pertama saja dan diikuti dkk)

- b. Kekuasaan Imperium Daratan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.
- c. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- d. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan.
- e. Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
- f. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

Teori geopolitik tidak homogenous Sebagai berikut :

- a. sekalipun semua membicarakan tentang bagaimana determinisme geografi menjadi impuls identitas, proses, dan budaya strategis suatu negara. Tak ada keseragaman. Identitas suatu negara memang ditetapkan berdasarkan keakuan, namun keakuan hanya muncul ketika ada kemerekaan dan oleh sebab itu, identitas bangsa maupun negara pada prinsipnya mengandung sentimen yang kuat akan "batas" (border).
- b. Budaya strategis suatu negara memang ditentukan oleh faktor-faktor sosiokultural dan pengalaman sejarah, namun faktor-faktor tersebut juga tidak kedap dari berbagai perubahan, khususnya karena persepsi seseorang terhadap sejarah itu sendiri. Dalam teori-teori geopolitik, geografi dipercaya sebagai faktor dominan yang mempengaruhi identitas, perilaku, dan interaksi suatu Negara.
- c. Jerman menjadi ekspansionsis sampai pertengahan abad 20 sebagian diantaranya karena kepercayaan bahwa penguasaan atas daerah jantung (heartland) menjadi satu-satunya cara untuk tampil sebagai negara adidaya. Amerika keluar dari isolasionalisme ketika Jerman dan Jepang mulai menjamah wilayah yang diyakininya sebagai daerah pinggiran (rimland), yang menurut pandangan geopolitik Amerika menjadi titik kunci untuk menyangga ambisi hegemoninya. Beberapa negara Asia Tenggara menganggap Tiongkok ingin menguasai Laut China Selatan karena konseptualisasinya tentang zhong quo (middle kingdom). Sengketa perbatasan merupakan faktor yang kerap kali menjadi sebab peperangan antar negara.

Perkembangan Isu Geopolitik

Masa Kini Istilah geopolitik meskipun sudah hampir seratus tahun menjadi populer di kalangan cendekiawan, negarawan serta militer, namun pengertian geopolitik masih memiliki makna yang berbeda-beda tergantung oleh siapa istilah tersebut ditafsirkan menurut kepentingan masing-masing pihak tersebut. Sehingga tidak salah apabila ada ahli yang bernama Klaus Dodds mengatakan bahwa "geopolitics is a slippery term", walaupun kemudian Dodds menyatakan juga bahwa "it is essential to be geopolitical." Pemahaman geopolitik adalah penting karena akan membantu kita memahami situasi yang terjadi terutama yang berhubungan dengan aktivitas negara dan masyarakat luas. Hal tersebut memungkinkan karena geopolitik memberi kita suatu gambaran tentang interaksi kepentingan dan pada akhirnya bagaimana hukum digunakan baik di dalam maupun di luar

negeri untuk kepentingan tertentu. Guna memperoleh pengertian geopolitik secara mendalam perlu kita perhatikan beberapa ahli yang mencoba mendefinisikannya.

Kita perhatikan adalah Sophie Chautard yang berasal dari Prancis, yang mengatakan bahwa geopolitik bukanlah sebuah ilmu sains namun sebuah disiplin yang mempelajari hubungan antara ruang dan politik (interaksi manusia). Pippa Malmgren, seorang cendekiawan yang pernah menjadi bagian dari strategic policymaking di pemerintahan Amerika Serikat dalam bukunya *Geopolitics for Investors* menuliskan bahwa, geopolitik secara umum dihubungkan dengan proyeksi negara ke luar negeri dengan berbagai cara atau alat dari negara. Definisi tersebut mencakup bagaimana negara secara aktif menggunakan kekuatannya di luar negeri serta tindakan pasif dalam merespon usaha geopolitik dari pihak lain yang menggunakan kekuatannya.

Hal ini juga mencakup semua aspek dari kedaulatan dan kekuasaan, tanpa memandang apakah alatnya atau tujuannya adalah ekonomis atau politis. Ungkapan secara umum adalah penting untuk diperhatikan karena hal itu memberikan ruang bagi aktor bukan negara yang dewasa ini semakin menjadi sumber tekanan geopolitis bagi negara dan obyek dari usaha geopolitik negara. Sedangkan Cohen berpendapat bahwa, “*Geopolitics is defined... as the analysis of the interaction between, on the one hand, geographical settings and perspectives and on the other, political processes.*” Collin Flint menyampaikan bahwa, “*Contemporary geopolitics identifies the sources, practices, and representations that allow for the control of territory and the extraction of resources.*” Dari penjelasan para ahli di atas dapat ditarik tiga hal yang penting yaitu;

- a. mengenai interaksi manusia dalam suatu hubungan kekuasaan (politik) di dalam suatu ruang tertentu;
- b. bagaimana aktor utama geopolitik tidak lagi terpusat pada negara tetapi pada aktor selain negara yang semakin punya peran dan legitimasi yang tinggi;
- c. berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya.

Apabila dahulu nenek moyang kita mengenal VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie atau Perusahaan dagang Belanda di Hindia Timur) yang sangat berkuasa dalam mengatur konflik kerajaan-kerajaan di Nusantara, maka kini masyarakat dunia mengenal perusahaan-perusahaan multi nasional yang bisa memengaruhi kebijakan negara secara dominan. Maka dapat juga dipahami di tengah perkembangan dunia digital saat ini definisi ruang tidak lagi hanya berkaitan dengan ruang fisik tetapi juga termasuk ruang maya, seperti halnya isu serangan siber terhadap Estonia berberapa waktu lalu serta dugaan manipulasi pemilu di Amerika Serikat melalui penetrasi digital. Contoh lainnya adalah dalam dunia maya sekarang marak akan jual-beli online yang para penjualnya berasal dari suatu negara tertentu mengincar pembeli-pembeli yang berasal dari negara-negara dengan kelas menengah yang berkembang. Apabila negara berkembang tersebut kaya akan sumber kekayaan alam, maka secara tidak langsung penjual online yang produknya laku tersebut ikut menguasai pemanfaatan sumber kekayaan alam negara tersebut. Hal tersebut tentunya di luar penguasaan langsung yang mungkin terjadi apabila pengelolaan sumber kekayaan alam negara tersebut dilakukan oleh aktor bukan negara yang bersifat multi-nasional namun pemanfaatannya tidak dilaksanakan atas dasar nilai-nilai yang berkeadilan. Dalam hal ini

hukum memiliki peran yang sangat penting apabila digunakan dengan melihat dan menyadari peta besar kepentingan yang terjadi. Khusus masyarakat Indonesia yang meningkat terus kelompok kelas menengahnya, telah banyak menjadi korban penipuan melalui aktivitas online, sehingga apabila tidak ada intervensi dari negara maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap hal tersebut, maka permasalahan ini bisa terus terjadi. Permasalahan ini pada dasarnya terjadi karena ada perubahan pemahaman masyarakat terhadap ruang yang sebelumnya fisik dan konkret menjadi maya. Dalam kondisi geopolitik seperti inilah pemahaman hukum harus terus berkembang. Banyak kalangan yang menyamakan geopolitik dengan kebijakan luar negeri, padahal geopolitik memiliki makna yang lebih mendalam.

Bagi beberapa ahli yang menekuni bidang geopolitik, ilmu geopolitik juga menyangkut hal-hal yang terjadi di luar kemampuan suatu negara untuk mengendalikannya. Pembajakan oleh bajak laut di selat Malaka tidak bisa dengan mudah dipahami dalam konteks hubungan internasional tetapi ia lebih mudah dipahami dalam konteks geopolitik. Hubungan internasional negara-negara Eropa barat serta Australia tidak bisa memenuhi kebutuhan suatu isu yang berkaitan dengan sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan, sedangkan geopolitik bisa. Maka itu tidak mengherankan pada 9 November 2015, Presiden Italia, Sergio Mattarella berbicara di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tentang kepentingan Italia dalam isu Laut Tiongkok Selatan dalam konteks geopolitik. Dalam menggunakan analisa geopolitik terdapat batasan-batasan tertentu yang harus kita pahami yaitu, ia tidak dapat memrediksi kapan waktu yang pasti atas suatu kejadian penting, krisis, titik-titik kunci yang mendorong perubahan radikal dalam suatu peta geopolitik. Namun analisa geopolitik dapat membantu membuat kebijakan untuk fokus pada kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan geopolitik. Pada akhirnya memahami geopolitik adalah hasil dari identifikasi terhadap pemahaman akan situasi, di mana geopolitik bukan hanya berkaitan dengan kompetisi antar-negara, karena kompetisi untuk menguasai suatu ruang atau wilayah bukan hanya urusan negara. Geopolitik juga berkaitan dengan konflik rasial dalam suatu kota, bahkan halangan bagi perempuan untuk berpergian secara bebas atas dasar hukum tertentu. Geopolitik juga berkaitan dengan orang-orang yang turun ke jalan untuk protes, kegiatan lembaga swadaya masyarakat, bahkan aktivitas perusahaan privat sekalipun, maka itu geopolitik adalah tindakan beragam dan perwakilan beragam dari berbagai macam wilayah.

Contoh hukum pidana Indonesia yang mengenal teritorial Indonesia maka saat ada ketentuan internasional yang mengatur tentang tindak pidana di luar aturan hukum pidana Indonesia yang berlaku dan kemudian pemerintah Indonesia meratifikasi peraturan tersebut maka ketentuan tersebut menjadi berlaku di Indonesia. Adapun hal kritis yang perlu kita pahami adalah apakah peraturan baru tersebut secara geopolitik memang pada hakikatnya berhubungan dengan kepentingan nasional atau merupakan kemenangan kepentingan di luar bangsa Indonesia dalam melakukan kontrol teritorial melalui perangkat hukum. Prof. Budi Susilo Soepandji memberikan suatu koridor dalam melakukan analisa geopolitik yang cukup penting yaitu “(analisa) geopolitik (suatu bangsa) pada intinya menyangkut tiga unsur penting yaitu, sejarah panjang suatu bangsa beserta lingkungannya strategisnya, posisi geografis

dari bangsa tersebut, serta cita-cita atau aspirasi bangsa tersebut.” Sejarah memang tidak mungkin secara persis diulang namun, dalam sejarah terdapat suatu gambaran tentang perangai atau kecenderungan seseorang, kelompok atau bahkan suatu bangsa dalam menyikapi suatu situasi geopolitik yang terbentuk atas interaksi dengan lingkungan strategisnya baik manusia lainnya maupun dengan alamnya yang secara alamiah menjadi kenyataan geografis, dari hal tersebut kemudian bisa dengan lebih mudah kita memahami apa yang menjadi aspirasi maupun cita-cita manusia atau kelompok manusia tersebut. Hal tersebut juga ditekankan oleh Prof. St. Munadjat Danusaputro seorang ahli hukum lingkungan dari Universitas Padjadjaran, melalui orasi ilmiahnya yang berjudul, “Ketahanan Nasional” dalam rangka peringatan HUT-ke14, Lemhannas RI, 20 Mei 1979. Saat itu beliau mengambil pendapat, Bernard Chenot dalam “Le Conseil d’Etat, son histoire a travers les documents d’époque 1799-1974”, (Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1974), Avant Propos, p. vii; “.... pour connaitre un homme, un peuple ou une institution, il faut d’arbord apprendre son histoire. A travers les ages et par l’action des hommes qui l’ont animé, sous la pression des évenement et par l’affirmation de quelque principes, le Conseil d’Etat d’aujourd’hui c’est lentement formé.” Ungkapan tersebut bermakna, “untuk mengenal seseorang, suatu bangsa atau lembaga, orang harus pertama-tama mempelajari sejarahnya. Dari abad ke abad dan berkat jerih-payah orang-orang yang telah menjiwainya, di bawah tekanan kejadian-kejadian dan karena penegasan prinsip-prinsipnya, terbentuklah perlahanlahan Conceil d’Etat dewasa ini”.

Contoh dari ungkapan di atas yang bisa kita pelajari adalah bagaimana Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang saat itu dipimpin oleh Ketua Mao. Dalam menghadapi konflik perbatasan dengan India, mereka menggunakan analogi zaman dinasti-dinasti sebelumnya. RRT memiliki sejarah panjang ribuan tahun membentuk bangsanya, pemahaman akan dirinya sebagai kerajaan tengah atau ‘Zhongguo’ adalah suatu hal yang terus bertahan dalam strategic culture pembuat kebijakan strategis Tiongkok. Saat negara RRT memasukkan Laut Tiongkok Selatan dalam peta di paspor warganya dan kemudian menjadi isu panas dalam hukum laut internasional di kawasan Asia Timur, maka bangsa Indonesia perlu memahami hal tersebut dalam konteks sejarah Tiongkok yang saat ini menjadi kenyataan geopolitik. Berangkat dari contoh kebijakan RRT di atas, maka kita perlu memahami bahwa cara suatu negara (atau entitas yang tengah berkompetisi atas suatu ruang) memosisikan dirinya di tengah pergaulan dunia, disebut sebagai kode geopolitik. Setiap negara memiliki kode geopolitik.

Sebagai contoh, pada abad kedua puluh satu Amerika Serikat memiliki kalkulasi geopolitik dengan berdasarkan kepentingan nasionalnya yang membuat ia memutuskan bahwa kehadirannya di titik-titik strategis dunia sebagai kode geopolitiknya. Saat pidato ‘Lahirnya Pancasila’ 1 Juni 1945, Bung Karno mengharapkan negara Indonesia yang akan lahir adalah negara yang dibentuk berdasarkan ‘kenyataan geopolitik’ yang tidak terpecah-pecah. Hal itu merupakan kode geopolitik bangsa Indonesia yang hingga saat ini, masih dipertahankan oleh pengambil kebijakan strategis Indonesia, yang sebelumnya telah diinformalkan melalui perjanjian internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. Kode geopolitik yang dimaksud tersebut adalah bersifat

teritorial. Sedangkan saat 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri Republik Indonesia mencantumkan salah satu tujuan negara Indonesia, sebagai “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” maka itu adalah kode geopolitik bangsa Indonesia yang kemudian salah satunya diterjemahkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 7, Ayat (2), Poin b. (6), menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang adalah melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Amerika Serikat pernah mendefinisikan kepentingan nasionalnya, sebagaimana dirilis oleh Commission on America's National Interest pada Juli 2000, dalam dua prioritas utama, yaitu, vital interests dan extremely important interests. Vital interests memiliki definisi sebagai suatu kondisi yang secara ketat harus ada guna menjaga dan memerkuat keselamatan dan kemakmuran rakyat Amerika dalam wadah negara yang merdeka dan aman. Dengan mengikuti penjelasan tentang prioritas kepentingan Amerika Serikat kita dapat memiliki gambaran tentang kebijakan negara tersebut dalam menggunakan instrumen-instrumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Malmgren mencatat bahwa, “national interests can conflict and often do,” maka hal inilah yang perlu kita perhatikan secara seksama.

Menifestasi Perubahan Geopolitik

Berakhirnya Perang Dunia Kedua melahirkan sistem bipolar, dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kekuatan hegemonik. Mereka berdua tidak saja bersaing secara langsung di mandala Eropa tetapi juga secara tidak langsung di kawasan-kawasan lain. Sosialisme menjadi semacam proyek ideologis bagi Stalin, sedang liberalisme demokrasi menjadi proyek aliansi Barat. Dekolonisasi memper tajam pertikaian itu, khususnya ketika Amerika maupun Soviet berusaha untuk memperoleh pengaruhnya di Dunia Ketiga. Washington dan Moskwa seakan-akan melihat semua itu sebagai proses zero-sum. Melalui Doktrin Zhandov, Moskow melihat “netralisme” seperti tercermin dalam Gerakan Non-Blok sebagai “immoral”, sedang Amerika Serikat juga melihat pemerintahan yang tidak pro Washington sebagai bagian dari aliansi Soviet. Dalam sistem bipolar, zero-sum game merupakan geostrategi dominan. Jatuhnya pemerintahan Nguyen Van Thieu di Saigon (Vietnam Selatan) dianggap akan memiliki efek domino berupa tersebarnya komunisme ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahkan pada masa awal Perang Dingin, nasionalisasi kontrol Barat atas beberapa akses dan sumber daya mineral, misalnya Terusan Suez (1956) dan perusahaan minyak di Iran pada masa Mossadheq, juga dianggap sebagai bukti kedekatan pada sistem sosialis Soviet. Hingga tingkat tertentu, demokrasi dan pasar bebas menjadi ideologi hegemonik yang dipercaya sebagai satu-satunya cara membangun perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama. Tentu saja persepsi seperti itu sangat ditandai dengan pragmatisme. Menurut dokumen-dokumen awal 1980an yang baru-baru ini dikeluarkan oleh CIA, sebagian besar pimpinan di negara berkembang tidak menganggap bantuan dari Uni Soviet atau Amerika Serikat sebagai sesuatu yang terpisah. Negara tertentu kerap kali menerima bantuan dari kedua belah pihak. Dalam kasus Indonesia, misalnya, kedekatan kepada Uni Soviet bukan merupakan pilihan utama tetapi baru dilakukan setelah Washington

menolak untuk memberi bantuan senjata untuk pengembalian Irian Barat. Kedekatan Vietnam pada Moskwa, terpatri dalam Perjanjian Soviet-Vietnam (1978) adalah kedekatan taktikal karena kecemasan Hanoi terhadap ketegangan etnik di sepanjang perbatasan Vietnam-China.

Manifestasi kedua adalah militerisasi di berbagai belahan bumi, perlombaan senjata antar negara adidaya, khususnya dalam bentuk aliansi pro-Amerika dibentuk di Asia Barat (CENTO, Central Treaty Organization, Baghdad Pact) dan SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) di Asia Tenggara. Sementara Uni Soviet, sekurang-kurangnya sampai pidato Gorbachev di Krasnoyarks (1988), membatasi diri untuk membentuk aliansi formal hanya di Eropa (Pakta Warsawa). Di negara-negara berkembang Uni Soviet lebih condong untuk mendukung rezim tertentu seperti Fidel Castro (Cuba) dan Allende (Peru) di Amerika Latin dan Karibia serta Robert Mugabe (Zimbabwe) dan Siad Barre (Somalia) di Afrika. Di luar aliansi formal seperti itu, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet melakukan operasi-operasi intelijen untuk menopang negara-negara boneka, seperti dan rezim Nguyen Van Thieu (Vietnam) dan Najibullah di Afghanistan. Temuan-temuan baru dibidang persenjataan mungkin lebih jelas menunjukkan perubahan betapa determinisme geografi merupakan fungsi dari teknologi. Lihat saja bagaimana rudal-rudal strategis ditetapkan berdasarkan jarak antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (5000 miles). Senjata-senjata dengan daya ledak yang sama tetapi jangkauan yang berbeda memiliki makna strategis yang tidak sama. Aspek lokasi tetap penting, seperti kemudian muncul dalam bentuk kontroversi penempatan rudal Amerika (Pershing dan Tomahawk) di Jerman Barat, sekalipun hanya memiliki jangkauan kurang dari 2500 km, dan secara teknis termasuk kategori rudal jarak menengah (intermediate range), kedua rudal itu dapat langsung mengenai Rusia karena jarak antara Rusia dan Jerman memang kurang dari 2500 km.

Perubahan penting terjadi setelah serangan teror terhadap Menara Kembar di New York. Peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa 911 itu menjadikan “perang melawan terorisme” (war on terror) menjadi mantra yang membidani berbagai formula strategi baru seperti ekstra-territorialitas, pertahanan diri untuk mencegah situasi memburuk (preventive/anticipatory self defense), bahkan serangan-serangan militer dengan dalih keselamatan manusia (humanitarian interventionism). Serangan terhadap Menara Kembar oleh seseorang dari dalam wilayah Amerika Serikat sendiri sungguh merupakan tantangan yang amat besar, bukan hanya bagi pemerintahan Washington tetapi juga bagi para teoritis Amerika yang selama ini menganggap bahwa ancaman akan berasal dari luar wilayah nasional Amerika. Teori-teori geostrategi memang tidak mudah menafsirkan bagaimana gerakangerakan transnasional ini menyebar seakanakan tanpa restriksi geografis. Sebagian karena realisme geografis, sebagian yang lain karena, respons geostrategis adalah dengan mengidentifikasi negara-negara lemah (weak states) atau negara-negara rapuh (fragile states) sebagai pemerintahan yang mendukung tindak terorisme.

Alasan Amerika untuk menyerang Afghanistan (2001) dan Iraq (2003) hanya merupakan sedikit contoh dari kasus kontemporer saja. Pergantian rezim (regime changes) oleh sebab itu menjadi satu-satunya pilihan, sekalipun kemudian terbukti hal itu tidak cukup menjanjikan situasi yang lebih baik, seperti terlihat dari kasus Iraq post-Saddam Hussein.

Baru pada pertengahan dasawarsa pertama abad 21 muncul berbagai teori konstruktivis geopolitik, seperti yang antara lain diajukan oleh Saul Cohen dan Tuahail. Cohen, misalnya, mencatat bahwa derajat geostrategis suatu kawasan berbeda satu dengan yang lain. Aliansi-aliansi baru muncul 10 Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 29 Maret 2017 tidak berdasarkan pada geografi seperti NATO atau Pakta Warsawa melainkan karena status perekonomian, seperti terlihat dalam kasus pasar bersama, G20, dan BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China). Konstruksi geografi tidak secara serta merta menjadikan suatu wilayah menjadi penting dalam kalkulasi geopolitik maupun geostrategis. Faktor yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai persepsi dalam pemaknaan geografi menemukan bentuknya yang lebih konkret, yaitu konektifitas suatu wilayah geografis pada akses.

KESIMPULAN

Geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1844-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi Geographical Politik.

Geopolitik Indonesia adalah perpaduan antara tantangan besar dan peluang strategis. Posisi geografis yang sangat penting, keberagaman sumber daya alam, serta pengaruh politik domestik dan internasional menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik. Dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan semangat menjaga stabilitas kawasan, Indonesia memiliki peran besar dalam diplomasi internasional. Namun, untuk dapat memaksimalkan peran tersebut, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan internal seperti keragaman sosial, ketegangan politik, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sambil menghadapi ancaman eksternal seperti ketegangan di Laut China Selatan dan persaingan antara kekuatan besar dunia.

Geopolitik memiliki makna yang berbeda-beda tergantung oleh siapa istilah tersebut ditafsirkan menurut kepentingan masing-masing pihak tersebut. Sehingga tidak salah apabila ada ahli yang bernama Klaus Dodds mengatakan bahwa “geopolitics is a slippery term”, walaupun kemudian Dodds menyatakan juga bahwa “it is essential to be geopolitical.” Pemahaman geopolitik adalah penting karena akan membantu kita memahami situasi yang terjadi terutama yang berhubungan dengan aktivitas negara dan masyarakat luas. Hal tersebut memungkinkan karena geopolitik memberi kita suatu gambaran tentang interaksi kepentingan dan pada akhirnya bagaimana hukum digunakan baik di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan tertentu. Guna memperoleh pengertian geopolitik secara mendalam perlu kita perhatikan beberapa ahli yang mencoba mendefinisikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Widjojo, dkk, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 37 MARET 2019, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nama Belakang Penulis (Jika lebih dari 3, maka tuliskan nama penulis pertama saja dan diikuti dkk)

- Agus Widjojo, dkk (2017), Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Dikdik Baehaqi Arif* (2012). Geopolitik Indonesia. Universitas ahmad Dahlan.
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 391-398.
- Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 2(1), 49–53.
- Nationalism, (London: Verso, 1983). Sumber Jurnal dari Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Ngalimun, H., Pd, M., & Kom, M. I. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Nugroho, A. G., & Latifah, L. (2022). Proses Pembelajaran Menggunakan Strategi Inkuiri Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dengan Hasil Kepuasan Guru Di Madrasah Tsanawiyah Assalam Martapura. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2).
- Suprapti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 4664-4673.